

Perbedaan Kesejahteraan Subjektif Pada Guru Sd Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) Di Kota Lhokseumawe

Differences in Subjective Welfare between Elementary School Teachers with Civil Servant Status (PNS) and Government Employees with Employment Agreements (PPPK) in Lhokseumawe City

Ran Dini Rahifah¹, Rini Julistia^{2*}, Hafnidar³

¹Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Malikussaleh Jl.Cot Teungku Nie, Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara 24355-Indonesia

*Correspondence author : rini.julistia@unimal.ac.id

ABSTRACT : This research aims to look at the differences in subjective well-being between elementary school teachers with Civil Servant (PNS) status and Government Employee Work Agreement (PPPK) teachers in Lhokseumawe City. This research uses a quantitative approach with a comparative research type. The number of samples in this study was one hundred and thirty-one PNS teachers and one hundred and thirty- one PPPK teachers. Sampling in this research used a probability sampling method with a simple random sampling technique. The results of this research show that H_0 is rejected and H_a is accepted with a significance value ($0.018 < 0.05$), meaning that there is a difference in subjective well-being between elementary school teachers with PNS status and teachers with PPPK status in the city of Lhokseumawe. Where teachers with PPPK status have higher subjective well-being than teachers with PNS status. This is because teachers with PPPK status view life satisfaction not only from economic factors, but working as a teaching teacher is a very noble job and in the subjective welfare component, the satisfaction domain that is considered important is work, so work becomes individual satisfaction in his life

Keywords: Civil Servant Teachers, PPPK Teachers, Subjective Welfare

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru SD berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu seratus tiga puluh satu guru PNS dan seratus tiga puluh satu guru PPPK. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikansi ($0,018 < 0,05$) artinya terdapat perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru SD berstatus PNS dengan guru berstatus PPPK di kota Lhokseumawe. Dimana guru berstatus PPPK memiliki kesejahteraan subjektif lebih tinggi dibandingkan guru berstatus PNS. Hal ini dikarenakan guru berstatus PPPK memandang kepuasan hidup bukan hanya dari faktor ekonomi saja

Kata Kunci : Guru PNS, Guru PPPK, Kesejahteraan Subjektif

Perbedaan Kesejahteraan Subjektif Pada Guru Sd Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) Di KotaLhokseumawe

Pendahuluan

Guru adalah pihak yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan inisiatif pengajaran yang harus kompetitif dalam mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan event pengajaran. Dengan kata lain, mampu mengelola pengajaran dengan efektif, efisien, dinamis dan positif (Rohani & Ahmadi, 1991). Guru juga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang kini banyak diminati oleh kalangan masyarakat (Tholibulhadi, 2020). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terbagi menjadi dua jenis yakni PNS dan PPPK. Meskipun keduanya termasuk ASN, PNS dan PPPK mempunyai definisi, hak, manajemen, dan proses seleksi yang berbeda. ASN memiliki hak atau kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum, serta kewajiban yang harus ditunaikan. Baik PNS maupun PPPK mempunyai kewajiban yang sama, tapi berbeda dari segi haknya. PNS memperoleh hak berupa gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara PPPK memiliki hak berupa gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan,

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.

Manajemen PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sementara manajemen PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Terdapat beberapa poin manajemen PNS yang tidak ada dalam manajemen PPPK seperti pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS, mempunyai jabatan dan jenjang karir berupa pangkat dan golongan yang terus berkembang setiap tahunnya, bisa mengisi jabatan struktural dan fungsional sekaligus. Sedangkan untuk PPPK, umumnya hanya dapat mengisi jabatan fungsional saja. Tak ada jenjang karir dikarenakan perjanjian kerja dengan masa kerja yang telah ditentukan. Hal inilah yang juga mendasari terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang tak diberikan kepada PPPK (UU. RI No. 14 Tahun 2005).

Kebijakan pemerintah dalam menghentikan rekrutmen guru PNS menjadi PPPK pada tahun 2021 menimbulkan pro dan kontra (Pangestuti et al., 2021). Pasalnya Nasib

PPPK 2021 Terancam, Pemda Kehabisan Anggaran. Pemda kesulitan membayar gaji dan memperpanjang kontrak kerja PPPK 2021. Disisi lain, jika pemda dibebankan sepenuhnya membayar gaji dan tunjangan PPPK akan membuat keuangan daerah terganggu apalagi yang kemampuan fisikalnya terbatas” (JPNN, 2023). Masalah lain yang dihadapi oleh guru dari sejumlah sekolah dasar di kota Lhokseumawe yaitu terdapat konflik yang belum terkelola dengan baik sehingga berdampak pada ketidaknyamanan, stres dan tingginya frekuensi keluar masuk guru di sekolah tersebut. Pada umumnya faktor penyebab konflik adalah: (1) tekanan kerja yang berat (*full day school*), (2) tugas dan tanggung jawab kerja yang tidak sesuai kontrak/SOP, (3) nominal gaji yang minim, (4) sistem kerja yang kurang memfasilitasi ide, gagasan dan masukan dari pihak guru, (5) kurangnya penghargaan atas kinerja dan prestasi kerja guru, (6) kebijakan-kebijakan yang kurang menghargai hak-hak guru, (7) pertimbangan keluarga, (8) stagnansi (tidak menunjukkan kemajuan dan merasakehilangan semangat kerja) (Idris & Herawati, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Howell dan Howell (2008) menunjukkan bahwa pendapatan seseorang berpengaruh pada tingkat

kesejahteraan subjektif yang dimiliki individu. Adapun menurut Diener dan Suh (1997) salah satu cara untuk melihat kualitas hidup masyarakat dapat dilihat melalui indikator ekonomi. Kemudian di dalam komponen kesejahteraan subjektif, bahwa kepuasan domain yang dianggap penting hal ini pekerjaan, maka pekerjaan itu akan menjadi kepuasan individu dalam kehidupannya (Diener, 2000)

Penelitian lain juga menunjukkan ada hubungan antara pendapatan dengan satu atau lebih, dari tiga komponen kesejahteraan subjektif diantaranya yaitu kepuasan hidup, aspek positif, dan aspek negatif (Lucas, Diener, & Suh, 2007). Kesejahteraan subjektif dan kebahagiaan dapat dibuat menjadi tiga kategori. Pertama, kesejahteraan subjektif bukanlah sebuah pernyataan subjektif tetapi merupakan beberapa keinginan berkualitas yang ingin dimiliki setiap orang. Kedua, kesejahteraan subjektif merupakan sebuah penilaian secara menyeluruh dari kehidupan seseorang yang merujuk pada berbagai macam kriteria. Ketiga, kesejahteraan subjektif jika digunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu dimana perasaan positif lebih besar dari pada perasaan negatif (Diener et al., 2009).

Metode

Perbedaan Kesejahteraan Subjektif Pada Guru Sd Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) Di KotaLhokseumawe

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komperatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru sd berstatus PNS dan berstatus PPPK dalam bekerja. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu kesejahteraan subjektif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling yaitu simple random sampling dengan sampel penelitian berjumlah 262 guru yang terdiri dari 131 guru PNS dan 131 guru PPPK.

Instrumen dalam penelitian ini adalah skala kesejahteraan subjektif yang di dimodifikasi dari Tholibulhadi (2020) berdasarkan 2 dimensi kesejahteraan subjektif yang dikembangkan oleh Diener (2009) yaitu dimensi kognitif dan afektif Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu kuesioner (angket). Skala dimensi kognitif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model skala likert dengan empat alternatif pilihan jawaban, yaitu: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), STS

(Sangat Tidak Setuju), dan TS (Tidak Setuju), dan skala afektif menggunakan alternatif jawaban Tidak Pernah (TP), Jarang (Ja), Sering (Sr), Selalu (Sl) Uji coba skala dilakukan pada 30 gur PNS dan 30 guru PPPK di kota Lhokseumawe. Terdapat 58 aitem skala kesejahteraan subjektif, dimana untuk uji coba ini dilakukan 2 kali putaran, Setelah melakukan uji coba skala kesejahteraan subjektif dari 58 aitem terdapat 26 aitem yang valid dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,893.

Penelitian ini dilakukan pada tanggal tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 di 2 kecamatan kota lhokseumawe yaitu banda sakti dan muara satu. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji asumsi yang terdri dari uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25. Setelah uji asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi, kemudian dilakukan uji hipotesis. Deskripsi data penelitian berdasarkan hasil uji data hipotetik dan data empiric.

Hasil

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) adalah ($0.018 < 0.05$). Hal tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Maka dapat diambil kesimpulan ada perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan.

Diskusi

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan, bahwa terdapat perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru sd berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) di kota Lhokseumawe. Guru berstatus PPPK memiliki kesejahteraan subjektif yang cenderung lebih tinggi dibandingkan guru berstatus PNS. Dimana guru berstatus PPPK lebih mampu dalam membangun emosi positif yang menjadikan kepuasan hidup dalam domain yang dirasakan guru berstatus PPPK, seperti kesehatan fisik, mental, pekerjaan, rekreasi hubungan social dan keluarga (Diener, 2009).

Meskipun guru PPPK memiliki perbedaan dan permasalahan seperti tidak adanya jaminan sosial, dapat mudah diberhentikan dari sekolah karna system kontrak kerja, hingga memiliki beban kerja yang berat namun guru PPPK merasa bahwa kehidupan yang ia miliki baik-baik saja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Buehler & O'Brien, 2011) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan jika ditinjau dari status bekerja. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Diener (dalam Snyder & Lopez, 2002) yang menemukan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan subjektif. Sehingga hal ini

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan tinggi rendah kategorisasi skor dimensi kognitif, yang menunjukan bahwa guru PPPK memiliki kesejahteraan subjektif lebih tinggi dari pada guru berstatus PNS.

Hal ini sesuai dengan teori Diener (2009) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki kepuasan hidup yang tinggi adalah individu yang memiliki tujuan penting dalam hidupnya dan berhasil untuk mencapai tujuan tersebut. Orang yang mendapat skor tinggi pada kepuasan hidup biasanya memiliki keluarga dekat dan dukungan dari teman-teman, memiliki pasangan romantis (meskipun hal ini tidak mutlak diperlukan), memiliki pekerjaan atau kegiatan bermanfaat, menikmati rekreasi, dan memiliki kesehatan yang baik. Mereka merasa bahwa hidup ini bermakna, serta memiliki tujuan dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Individu yang puas akan kehidupannya adalah individu yang menilai bahwa kehidupannya mungkin memang tidak sempurna tetapi segala sesuatu berjalan dengan baik, mereka mempunyai keinginan untuk berkembang, dan menyukai tantangan. Hal ini juga sesuai dengan teori Diener (2000) yang menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif bersifat demokratis, yang memberikan hak kepada masing-masing

Perbedaan Kesejahteraan Subjektif Pada Guru Sd Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) Di KotaLhokseumawe

individu untuk memutuskan apakah hidupnya berharga.

Selanjutnya peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan usia hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif berdasarkan usia PNS dewasa madya lebih rendah dari pada usia dewasa awal. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian Tiefenbach dan Kohlbacher (2013) menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif berbentuk huruf U, titik terendah kepuasan hidup berada pada kelompok usia 40-60 tahun. Berbanding terbalik dengan kesejahteraan subjektif berdasarkan usia PPPK pada tabel 4.9 usia dewasa awal lebih tinggi dari pada usia dewasa madya. Hasil penelitian tersebut senada dengan penelitian Clark and Oswald (2006) menjelaskan bahwa kesejahteraan subjektif berbentuk Kurva U dalam perjalanan hidup, tingkat kepuasan hidup di antara laki-laki dan perempuan Eropa minimum sekitar pertengahan usia 40-an. Menurut Diener dan Oishi (2005) usia dan jenis kelamin memiliki hubungan terhadap kesejahteraan subjektif, namun pengaruhnya bergantung kepada strategi sudut komponen kesejahteraan subjektif yang akan diukur. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa sejauh mana faktor demografis, tertentu dapat

meningkatkan kesejahteraan subjektif tergantung dari nilai dan tujuan yang dimiliki seseorang, kepribadian dan kultur (Diener, 2005).

Berdasarkan kategorisasi kesejahteraan guru bersertifikasi dan non sertifikasi, guru bersertifikasi berada pada kategori tinggi dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa guru bersertifikasi memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pembelajaran yang akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Suwardi, 2014). Selain itu peneliti menambahkan uji beda kesejahteraan subjektif dari faktor demografi sertifikasi dan non-sertifikasi. Dari hasil analisis uji beda kesejahteraan subjektif berdasarkan guru bersertifikasi dan non sertifikasi artinya tidak ada perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru yang mengajar berdasarkan kepemilikan sertifikat pendidik (sertifikasi) dan tidak memiliki sertifikat pendidik (non-sertifikasi). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fakhrunnisak dan Qudsyi (2015) yang berjudul perbedaan Subjective well-being antara guru yang bersertifikasi mengajar dan guru yang tidak bersertifikasi mengajar.

Dalam penelitian Fakhrunnisak dan Qudsyi (2015) menunjukkan hasil tidak ada perbedaan subjective well-being

antara guru yang bersertifikasi mengajar dan guru yang tidak bersertifikasi mengajar. Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kesejahteraan subjektif ini tergantung pada masing-masing guru. Ada beberapa guru yang tidak bersertifikasi mengajar mengungkapkan bahwa merasa sejahtera walaupun belum mendapatkan sertifikasi, selalu mensyukuri apa yang telah didapatkannya. Ada pula guru yang telah bersertifikasi mengajar mengungkapkan bahwa merasakan sejahtera tetapi merasa keberatan apabila tuntutan yang diberikan oleh pemerintah banyak, kesannya seperti memberi kesejahteraan guru dengan sertifikasi tapi tuntutannya banyak. Guru tersebut mengatakan bahwa solusi untuk pemerintah yaitu tuntutannya dikurangi, tidak perlu satu gaji, separuh gaji tidak masalah tetapi mengurangi tuntutan yang diberikan agar bisa menikmati kesejahteraan

Keterbatasan penelitian ini yaitu dalam teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua kecamatan saja yaitu Banda Sakti dan Muara Satu dari empat kecamatan di Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu untuk menggeneralisasi hasil penelitian pada konteks yang luas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa ada perbedaan kesejahteraan subjektif pada guru SD berstatus PNS dan guru PPPK di Kota Lhokseumawe. Dimana kesejahteraan subjektif pada guru berstatus PPPK lebih tinggi dibandingkan guru berstatus PNS. Hal ini dikarenakan guru berstatus PPPK tidak merasa kekurangan finansial meskipun tidak mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagai mana mestinya hak yang harus didapatkan sebagai pegawai ASN seperti guru berstatus PNS, guru berstatus PPPK memandang kepuasan hidup bukan hanya dari faktor ekonomi saja akan tetapi bekerja menjadi seorang guru pengajar adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang mereka miliki sekarang adalah salah satu kepuasan dalam hidup yang dimilikinya, dalam komponen kesejahteraan subjektif, bahwa kepuasan domain yang dianggap penting hal ini yaitu pekerjaan, maka pekerjaan menjadi kepuasan individu dalam kehidupannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. bagi sekolah dasar negeri tempat guru mengajarepada seluruh kepala

Perbedaan Kesejahteraan Subjektif Pada Guru Sd Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) Di KotaLhokseumawe

Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berada di kota lhokseumawe agar lebih memperhatikan guru PNS dan PPPK dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif. Seperti dukungan social dari rekan kerja, serta apresiasi dari atasan dan tuntutan pekerjaan yang sesuai dengan batas kemampuan guna meningkatkan kesejahteraan subjektif kepada dua status guru tersebut yaitu PNS dengan PPPK.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan yang sama

bisa menggunakan metode analisis lainnya seperti metode kualitatif ataupun penggabungan antara keduanya (mix method) agar mendapat kan hasil yang mendalam. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak bahan referensi baik itu buku atau pun jurnal lainnya agar dapat melengkapi kekurangan dari penelitain ini.

Referensi

- Azwar, S. (2021). *Penyusunan Skala Psikologi*. Pustaka Pelajar
- Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi. (1991). *Pengelolaan Pengajaran*. Rineka Cipta.
- Amin, S., Dewi, R., & Safarina, N. A. (2022). *Investigating Subjective Well-Being On the Honorary Education Staff at Malikussaleh University, Aceh*. 4(1), 46–173.
- Ayu, R. P., & Nurani, G. A. (2023). Peran kepuasan kerja terhadap kesejahteraan subjektif pada karyawan borong dan harian. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*. 14(1). 12-22.
- Balkis, A. S., & Masykur, A. M. (2016). *Memahami Subjective Well-Being Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri*. 5(2), 223–228.
- Buehler, C., & O'Brien, M. (2011). Mothers' Part-Time Employment: Associations With Mother and Family Well-Being. *Journal of Family Psychology*, 25(6), 895–906. <https://doi.org/10.1037/a0025993>
- Butler, R. (2007). *Teachers' Achievement Goal Orientations and Associations With Teachers' Help Seeking: Examination of a Novel Approach to Teacher Motivation*. 99(2), 241–252. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.2.241>
- Compton, C. W., & Huffman, E. (2013). *Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing* (2nd ed.). In *Belmont* (2nd ed.). Wadsworth.
- Clark, A. and A. Oswald. 2006. The curve relationship between subjective wellbeing and age. PSE Workig Paper. 2006-29
- Diener, E. (1984). Subjective well-being. *Psychological Bulletin*, 95(3), 542–575. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542>
- Diener, E., Suh, E., & Oishi, S. (1997). Recent findings on subjective well-being. *Indian Journal of Clinical Psychology*, 24(1), 25–41.
- Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*, 55(1), 34–43. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- Diener, Ed. (2007). *Culture and wellbeing : The collected works of Ed Diener*. Springer is Part of Springer Science + Busines Media.
- Diener, E., & Biswas, R. D. (2008). *Happiness : Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth*. Diener, E., Glatzer, W., Moum, T., A.G.Sprangers, M., Vogel, J., & Veenhoven, R. (2009). *The Science of*
- Well-Being The Collected Works of Ed Diener. In P. E. Diener (Ed.), *The Science of Well-Being*. <https://doi.org/DOI 10.1007/978-90-481-2350-6>

**Perbedaan Kesejahteraan Subjektif Pada Guru Sd Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dan Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK) Di KotaLhokseumawe**

- Diener, E., Larsen, R. J., & EID, M. (2008). *Ed Diener dan Ilmu Kesejahteraan Subjektif*.
- Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2005). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction. *The Oxford Handbook of Positive Psychology, (2 Ed.)*, February 2019, 1–16. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0017>
- Eddington, N., & Shuman, R. (2005). *Subjective Well-Being (Happines)*. Continuing Psychology Education: 6 Continuing Education Hours.
- Faedlulloh, D. (2015). *Kerja Dalam Kesetaraan: Studi Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Proyeksi Konfigurasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Indonesia*. 9(2), 11– 20.
- Fakhrunnisak, & Qudsyi, H. (2015). Perbedaan Subjective Well Being Antara Guru Bersertifikasi dan Non Sertifikasi. *Jurnal RAP UNP*, 6(2), 126–135.
- Gaol, N. T. L. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Guru Mengalami Stres di Sekolah. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4(1), 17–28.
- Howell, R. T., & Howell, C. J. (2008). *The Relation of Economic Status to Subjective Well-Being in Developing Countries : A Meta-Analysis*. 134(4), 536–560. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.4.536>.
- Hidayati, L., Amanda, R., Samara, S., Agustin, Y., & Sukatni. (2023). Pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan subjektif pada siswa (definisi kesejahteraan subjektif). *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1 (3). 177-185 DOI: <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3>
- Idris, J., & Herawati. (2019). *Manajemen Konflik Bernuansa Islami di SD Ramah Anak Kota Lhokseumawe*. 4(1), 73–89.
- Irianti, S. (2020). Gambaran optimisme dan kesejahteraan subjektif pada ibu tunggal di usia dewasamadya. *Jurnal Psikoborneo*. 8(1). 107-116
- JPNN. (2023). *Nasib PPPK 2021 Terancam, Pemda Kehabisan Anggaran, Kontar Kerjanya Bagaimana?* JPNN.Com.
- Liu, S., & Onwuegbuzie, A. J. (2012). Chinese teachers' work stress and their turnover intention. *International Journal of Educational Research*, 53, 160–170. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2012.03.006>
- Munizar, & Safarina, N. A. (2022). *Gambaran Kesejahteraan Subjektif Pada Teungku Dayah Di Kabupaten Bireun*. 07(01), 55–62.
- Pangestuti, T. T. A., Wulandari, R., Jannah, E. M., & Setiawan, F. (2021). *Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK*. 2(4), 1133–1138.
- Priyatno, D. (2011). *Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS*. Mediakom.